



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/2/2025

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan pemeriksaan APIP, perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6061)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan focus pada:
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - Akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - Penguatan tata kelola kerja pemerintahan dan penegakkan integritas;
 - Peningkatan Kapabilitas Aparat pengawas Intern Pemerintah; dan
 - Mandatory Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengawasan/pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, meliputi :

1. Administrasi umum
2. Urusan pemerintahan

II. SASARAN PEMERIKSAAN

Sasaran pengawasan/pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, meliputi :

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki resiko tinggi.
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
 - a. Pemeriksaan Investigasi
 - b. Penjatuhan Administratif
 - c. Perhitungan Kerugian Negara
3. Pengawasan yang bersifat mandatori -
 - a. Kinerja rutin pengawasan
 - b. Pengawasan Prioritas Nasional
 - Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawasan intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.
 - Operasional Sapu bersih pungutan liar
 - Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis Gender.
 - Dana Desa.
 - Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
4. Pengawasan Reformasi Birokrasi
5. Penegakan Integritas.
6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan.

**III. OBYEK YANG DIPERIKSA, JADWAL PELAKSANAAN JUMLAH TIM /
TENAGA, ANGGARAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2023**

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					Jumlah LHA /LHR
									Bulan	Minggu				
										I	II	III	IV	
I	IRBAN I													
1	Pemda Kabupaten Polewali Mandar	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 1) Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan Pemda yang disajikan telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Maret	v				1 LHR
2	OPD Tim I	Reviu Laporan Keuangan OPD 1) Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan OPD yang disajikan telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Februari			v		1 LHR
3	OPD Tim II	Reviu Laporan Keuangan OPD 1) Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan OPD yang disajikan telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Februari			v		1 LHR
4	OPD Tim III	Reviu Laporan Keuangan OPD 1) Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan OPD yang disajikan telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Februari			v		1 LHR
5	OPD Tim IV	Reviu Laporan Keuangan OPD 1) Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan OPD yang disajikan telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Februari			v		1 LHR

6	OPD Tim V	Reviu Laporan Keuangan OPD 1) Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan OPD yang disajikan telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Februari			v		1 LHR
7	OPD Tim VI	Reviu Laporan Keuangan OPD 1) Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan OPD yang disajikan telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Februari			v		1 LHR
8	OPD Tim VII	Reviu Laporan Keuangan OPD 1) Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan OPD yang disajikan telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Februari			v		1 LHR
8	OPD Tim VIII	Reviu Laporan Keuangan OPD 1) Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan OPD yang disajikan telah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Februari			v		1 LHR
9	Pemda Kabupaten Polewali Mandar	Reviu APBD 2026 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas(limited asurance) atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	September			v		1 LHR
10	OPD Tim I	Reviu RKA Perangkat Daerah Tahun 2026 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas(limited asurance) atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	September			v		8 LHR

11	OPD Tim II	Reviu RKA Perangkat Daerah Tahun 2026 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas(limited asurance) atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	September			v		1 LHR
12	OPD Tim III	Reviu RKA Perangkat Daerah Tahun 2026 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas(limited asurance) atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	September			v		1 LHR
13	OPD Tim IV	Reviu RKA Perangkat Daerah Tahun 2026 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas(limited asurance) atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	September			v		1 LHR
14	OPD Tim V	Reviu RKA Perangkat Daerah Tahun 2026 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas(limited asurance) atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	September			v		1 LHR
15	OPD Tim VI	Reviu RKA Perangkat Daerah Tahun 2026 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas(limited asurance) atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	September			v		1 LHR

15	OPD Tim VII	Reviu RKA Perangkat Daerah Tahun 2026 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas(limited asurance) atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	September			v		1 LHR
16	Pemda Kabupaten Polewali Mandar	Reviu APBD-P Perubahan 2025 Pemda 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas(limited asurance) atas kualitas perencanaan penganggaran dan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	September	v				1 LHR
17	1. Dinas Kesehatan, 2. RSUD, 3. Dinas Penegendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 4. Dinas Pertanian dan Pangan 5. Dinas Pekerjaan Umum dan	Reviu Dana DAK OPD Tahap I TA.2025 1) Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai ketentuan yang berlaku	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	April			v		1 LHR
18	1. Dinas Kesehatan, 2. RSUD, 3. Dinas Penegendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 4. Dinas Pertanian dan Pangan 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 6.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 8. Dinas kelautan dan perikanan	Reviu Dana DAK OPD Tahap II TA.2025 1) Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai ketentuan yang berlaku	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	September	v				1 LHR

19	1. Dinas Kesehatan, 2. RSUD, 3. Dinas Penegendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 4. Dinas Pertanian dan Pangan 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 6.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 8. Dinas kelautan dan perikanan	Reviu Dana DAK OPD Tahap III TA.2025 1) Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai ketentuan yang berlaku	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Desember	v				1 LHR
20	Pemerintah Daerah (Badan Keuangan)	Reviu atas SHS (Standar Harga Satuan) Tujuan: Penelaahan ulang dan memberikan keyakinan terbatas bahwa SSH telah disusun ssesui ketentuan , standar ,rencana tau norma yang telah ditetapkan serta memberikan saran dan perbaikan	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Juni	v				1 LHR
21	Pemerintah Daerah (Badan Keuangan)	Reviu atas Analisa Standar Biaya Tujuan: Penelaahan ulang dan memberikan keyakinan terbatas bahwa ASB telah disusun sesuai ketentuan , standar ,rencana tau norma yang telah ditetapkan serta memberikan saran dan perbaikan	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Juni	v				1 LHR
22	Dinas Kesehatan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor kesehatan tanpa penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Juli			v		1 LHR
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor pendidikan terutama pada penerimaan peserta didik baru	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Juli			v		1 LHR

24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor kependudukan dan pencatatan sipil tanpa penyusunan/ gratifikasi/ pemerasan	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Juli			v		1 LHR
25	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Perizinan (termasuk rekomendasi teknis)	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Juli			v		1 LHR
26	Tim I OPD	Reviu Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tujuan : Memberi keyakinan terbatas atas optimalisasi penerimaan daerah	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Agustus	v				1 LHR
27	Tim II OPD	Reviu Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Memberi keyakinan terbatas atas optimalisasi penerimaan daerah	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Agustus	v				1 LHR
28	Tim III OPD	Reviu Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Memberi keyakinan terbatas atas optimalisasi penerimaan daerah	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Agustus	v				1 LHR
29	Pemda Kabupaten Polewali Mandar	Reviu P3DN Semester I Tujuan : Kebijakan dan implementasi belanja pemerintah daerah yang dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri serta realisasi penggunaan produk dalam negeri dalam belanja pemerintah daerah	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Juli			v		1 LHR

30	Tim I Dinas/Program berdasarkan prioritas RPJMD	Audit Kinerja Tujuan : Untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Maret			v		1 LHR
31	Tim I Dinas/Program berdasarkan prioritas RPJMD	Audit Kinerja Tujuan : Untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Maret			v		1 LHR
32	Tim II Dinas/Program berdasarkan prioritas RPJMD	Audit Kinerja Tujuan : Untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Maret			v		1 LHR
33	Pemda Kabupaten Polewali Mandar	Reviu P3DN Semester II Tujuan : Kebijakan dan implementasi belanja pemerintah daerah yang dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri serta realisasi penggunaan produk dalam negeri dalam belanja pemerintah daerah	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Nopember			v		1 LHR
34	Tim I Kecamatan Binuang	Audit Tujuan Tertentu atas pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Agustus			v		6 LHR
35	Tim II Kecamatan Matakali	Audit Tujuan Tertentu atas pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Agustus			v		6 LHR

36	Tim III Kecamatan Mapilli	Audit Tujuan Tertentu atas pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Agustus			v		6 LHR
37	Tim I Kecamatan Balanipa,	Audit Tujuan Tertentu atas pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Nopember			v		6 LHR
38	Tim II Kecamatan Alu	Audit Tujuan Tertentu atas pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Nopember			v		6 LHR
39	Tim III Kecamatan Matangnga	Audit Tujuan Tertentu atas pengelolaan keuangan, kepegawaian dan aset	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Nopember			v		1 LHR
40	Desa di kecamatan Binuang	Audit tujuan tertentu atas Ketaatan Pajak	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Februari	v				1 LHR
41	Desa di kecamatan Matakali	Audit tujuan tertentu atas Ketaatan Pajak	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Februari	v				1 LHR

42	Desa di kecamatan Mapilli	Audit tujuan tertentu atas Ketaatan Pajak	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Februari	v				1 LHR
43	Desa di kecamatan balanipa	Audit tujuan tertentu atas Ketaatan Pajak	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Mei	v				1 LHR
44	Desa di kecamatan alu	Audit tujuan tertentu atas Ketaatan Pajak	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Mei	v				1 LHR
45	Desa di kecamatan Matangnga	Audit tujuan tertentu atas Ketaatan Pajak	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Mei	v				1 LHR
46	Desa di kecamatan Binuang	Audit tujuan Tertentu atas Dana Desa dan ADD Tujuan : Menilai secara keseluruhan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Juni			v		1 LHR

47	Desa di kecamatan Matakali	Audit tujuan Tertentu atas Dana Desa dan ADD Tujuan : Menilai secara keseluruhan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta kepatuhan terhadap pertaturan perundang-undangan yang berlaku	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Juni			v		1 LHR
48	Desa di kecamatan Mapilli	Audit tujuan Tertentu atas Dana Desa dan ADD Tujuan : Menilai secara keseluruhan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta kepatuhan terhadap pertaturan perundang-undangan yang berlaku	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Juni			v		1 LHR
49	Desa di kecamatan balanipa	Audit tujuan Tertentu atas Dana Desa dan ADD Tujuan : Menilai secara keseluruhan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta kepatuhan terhadap pertaturan perundang-undangan yang berlaku	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Oktober			v		1 LHR
50	Desa di kecamatan alu	Audit tujuan Tertentu atas Dana Desa dan ADD Tujuan : Menilai secara keseluruhan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta kepatuhan terhadap pertaturan perundang-undangan yang berlaku	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Oktober			v		1 LHR

51	Desa di kecamatan Matangnga	Audit tujuan Tertentu atas Dana Desa dan ADD Tujuan : Menilai secara keseluruhan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta kepatuhan terhadap pertaturan perundang-undangan yang berlaku	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 12,800,000	Oktober			v		1 LHR
52	OPD Tim I	Evaluasi Pengendalian Inflasi Tahun Anggaran 2025 Triwulan I Tujuan : Memberi keyakinan terbatas atas penganggaran dan realisasi anggaran belan ja wajib dalam rangka pengendalian inflasi telah berjalan sesuai dengan prisedur, standar, norma dan aturan perundang-undangan yang berlaku	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	April			v		1 LHR
53	OPD Tim II	Evaluasi Pengendalian Inflasi Tahun Anggaran 2025 Triwulan II Tujuan : Memberi keyakinan terbatas atas penganggaran dan realisasi anggaran belan ja wajib dalam rangka pengendalian inflasi telah berjalan sesuai dengan prisedur, standar, norma dan aturan perundang-undangan yang berlaku	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Juli			v		1 LHR
54	OPD Tim III	Evaluasi Pengendalian Inflasi Tahun Anggaran 2025 Triwulan III Tujuan : Memberi keyakinan terbatas atas penganggaran dan realisasi anggaran belan ja wajib dalam rangka pengendalian inflasi telah berjalan sesuai dengan prisedur, standar, norma dan aturan perundang-undangan yang berlaku	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Oktober			v		1 LHR

55	OPD Tim IV	Evaluasi Pengendalian Inflasi Tahun Anggaran 2025 Triwulan IV Tujuan : Memberi keyakinan terbatas atas penganggaran dan realisasi anggaran belan ja wajib dalam rangka pengendalian inflasi telah berjalan sesuai dengan prisedur, standar, norma dan aturan perundang-undangan yang berlaku	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Desember			v		1 LHR
56	Desa-Desa di Kab. Polewali Mandar Tim I	Audit Tujuan Tertentu 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Dana Bumdes Sudah sesuai dengan Aturan Perundang-undangan yang berlaku	2023/2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Agustus			v		1 LHR
57	Desa-Desa di Kab. Polewali Mandar Tim II	Audit Tujuan Tertentu 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Dana Bumdes Sudah sesuai dengan Aturan Perundang-undangan yang berlaku	2023/2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Agustus			v		1 LHR
58	Desa-Desa di Kab. Polewali Mandar Tim III	Audit Tujuan Tertentu 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Dana Bumdes Sudah sesuai dengan Aturan Perundang-undangan yang berlaku	2023/2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Agustus			v		1 LHR
59	Badan Keuangan	Reviu SP2D 1) Memberikan keyakinan terbatas mengenai keabsahan dokumen SP2D telah sesuai dengan dokumen pendukungnya	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Januari			v		1 LHR

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
II	IRBAN KESRA																		
1	Tim I Opname kas bendahara Pengeluaran OPD	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara OPD sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas realisasi belanja OPD	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,520,000	Jan	√				Jan		√			1 LHA
2	Tim II Opname kas bendahara Pengeluaran OPD	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara OPD sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas realisasi belanja OPD	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,520,000	Jan	√				Jan		√			1 LHA
3	Tim III Opname kas bendahara Pengeluaran OPD	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara OPD sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas realisasi belanja OPD	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,520,000	Jan	√				Jan		√			1 LHA
4	Tim IV Opname kas bendahara Pengeluaran OPD	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara OPD sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas realisasi belanja OPD	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,520,000	Jan	√				Jan		√			1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
II	IRBAN KESRA																		
5	Tim V Opname kas bendahara Pengeluaran OPD	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara OPD sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas realisasi belanja OPD	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,520,000	Jan	√				Jan		√			1 LHA
6	Tim VI Opname kas bendahara Pengeluaran OPD	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara OPD sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas realisasi belanja OPD	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,520,000	Jan	√				Jan		√			1 LHA
7	Tim VII Opname kas bendahara Pengeluaran OPD	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara OPD sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas realisasi belanja OPD	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,520,000	Jan	√				Jan		√			1 LHA
8	Tim VIII Opname kas bendahara Pengeluaran OPD	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara OPD sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas realisasi belanja OPD	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,520,000	Jan			√		Jan				√	1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
II	IRBAN KESRA																		
9	Tim I Opname kas bendahara sekolah di wilayah	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara Sekolah sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,520,000	Jan			√		Jan				√	1 LHA
10	Tim II Opname kas bendahara sekolah di wilayah	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara Sekolah sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,520,000	Jan			√		Jan				√	1 LHA
11	Tim III Opname kas bendahara sekolah di wilayah	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara Sekolah sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,520,000	Jan			√		Jan				√	1 LHA
12	Tim IV Opname kas bendahara sekolah di wilayah	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara Sekolah sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,520,000	Jan			√		Jan				√	1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
II	IRBAN KESRA																		
13	Tim V Opname kas bendahara sekolah di wilayah	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara Sekolah sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,520,000	Jan			√		Jan				√	1 LHA
14	Tim VI Opname kas bendahara sekolah di wilayah	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara Sekolah sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,520,000	Jan			√		Jan				√	1 LHA
15	Tim VII Opname kas bendahara sekolah di wilayah	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara Sekolah sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,520,000	Jan			√		Jan				√	1 LHA
16	Tim VIII Opname kas bendahara sekolah di wilayah	Audit Tujuan tertentu/Untuk menguji kebenaran nilai saldo kas pada Bendahara Sekolah sebagai bagian dari administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,520,000	Jan			√		Jan				√	1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
II	IRBAN KESRA																		
17	Tim I Pemeriksaan Dana BOS	Audit Tujuan Tertentu/Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,520,000	Mei	√				Mei		√			1 LHA
18	Tim II Pemeriksaan Dana BOS	Audit Tujuan Tertentu/Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,520,000	Mei	√				Mei		√			1 LHA
19	Tim III Pemeriksaan Dana BOS	Audit Tujuan Tertentu/Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,520,000	Mei	√				Mei		√			1 LHA
20	Tim IV Pemeriksaan Dana BOS	Audit Tujuan Tertentu/Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,520,000	Mei	√				Mei		√			1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
II	IRBAN KESRA																		
21	Tim V Pemeriksaan Dana BOS	Audit Tujuan Tertentu/Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,520,000	Mei	√				Mei		√			1 LHA
22	Tim VI Pemeriksaan Dana BOS	Audit Tujuan Tertentu/Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,520,000	Mei	√				Mei		√			1 LHA
23	Tim VII Pemeriksaan Dana BOS	Audit Tujuan Tertentu/Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,520,000	Mei	√				Mei		√			1 LHA
24	Tim VII Pemeriksaan Dana BOS	Audit Tujuan Tertentu/Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,520,000	Mei	√				Mei		√			1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
II	IRBAN KESRA																		
25	Pemda/Reviu Penyerapan Anggaran Triwulan 1	Reviu PAPBJ/Menilai apakah pemda telah menyusun anggaran dan memiliki postur anggaran, perencanaan belanja dengan baik dan menganggarkan belanja wajib, amanat pemerintah	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Maret			√		Maret				√	1 LHR
26	Pemda/Reviu Penyerapan Anggaran Triwulan 2	Reviu PAPBJ/Menilai apakah pemda telah menyusun anggaran dan memiliki postur anggaran, perencanaan belanja dengan baik dan menganggarkan belanja wajib, amanat pemerintah	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Juni			√		Juni				√	1 LHR
27	Pemda/Reviu Penyerapan Anggaran Triwulan 3	Reviu PAPBJ/Menilai apakah pemda telah menyusun anggaran dan memiliki postur anggaran, perencanaan belanja dengan baik dan menganggarkan belanja wajib, amanat pemerintah	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Sept			√		Sept				√	1 LHR
28	Pemda/Reviu Penyerapan Anggaran Triwulan 4	Reviu PAPBJ/Menilai apakah pemda telah menyusun anggaran dan memiliki postur anggaran, perencanaan belanja dengan baik dan menganggarkan belanja wajib, amanat pemerintah	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Des			√		Des				√	1 LHR

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
II	IRBAN KESRA																		
29	Dinas/Program berdasarkan 10 proyek prioritas	Audit probity/ Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap probity requirement/kejujuran yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	2025	Mandatory	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	April			√		April				√	1 LHA
30	Dinas/Program berdasarkan 10 proyek prioritas	Audit probity/ Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap probity requirement/kejujuran yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	2025	Mandatory	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	April			√		April				√	1 LHA
31	Dinas/Program berdasarkan 10 proyek prioritas	Audit probity/ Untuk memberikan ` memadai terhadap probity requirement/kejujuran yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	2025	Mandatory	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Okt	√				Okt		√			1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
II	IRBAN KESRA																		
32	Dinas/Program berdasarkan 10 proyek prioritas	Audit probity/ Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap probity requirement/kejujuran yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	2025	Mandatory	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Okt	√				Okt		√			1 LHA
33	Dinas/Program berdasarkan 10 proyek prioritas	Audit probity/ Untuk memberikan keyakinan memadai terhadap probity requirement/kejujuran yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan	2025	Mandatory	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Okt	√				Okt		√			1 LHA
35	Dinas Pendidikan/BOP Tim 1	ATT/untuk menilai apakah pengelolaan Dana BOP telah sesuai dengan norma, standar. Prosedur dan ketentuan	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Mei			√						√	1 LHA
36	Dinas Pendidikan/BOP Tim 2	ATT/untuk menilai apakah pengelolaan Dana BOP telah sesuai dengan norma, standar. Prosedur dan ketentuan	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Mei			√						√	1 LHA
37	Dinas Pendidikan/BOP Tim 3	ATT/untuk menilai apakah pengelolaan Dana BOP telah sesuai dengan norma, standar. Prosedur dan ketentuan	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Mei			√						√	1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
II	IRBAN KESRA																		
38	Dinas Pendidikan/BOP Tim 4	ATT/untuk menilai apakah pengelolaan Dana BOP telah sesuai dengan norma, standar. Prosedur dan ketentuan	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Mei			√						√	1 LHA
39	Dinas Pendidikan/BOP Tim 5	ATT/untuk menilai apakah pengelolaan Dana BOP telah sesuai dengan norma, standar. Prosedur dan ketentuan	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Mei			√						√	1 LHA
41	Kecamatan Polewali	ATT/untuk menilai pengelolaan keuangan kecamatan/kelurahan telah sesuai dengan standar, norma, dan ketentuan yang berlaku	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Agus			√		Agus				√	1 LHA
42	Kecamatan Tapango	ATT/untuk menilai pengelolaan keuangan kecamatan/kelurahan telah sesuai dengan standar, norma, dan ketentuan yang berlaku	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Agus			√		Agus				√	1 LHA
43	Kecamatan Luyo	ATT/untuk menilai pengelolaan keuangan kecamatan/kelurahan telah sesuai dengan standar, norma, dan ketentuan yang berlaku	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Agus			√		Agus				√	1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
II	IRBAN KESRA																		
44	Kecamatan Tinambung	ATT/untuk menilai pengelolaan keuangan kecamatan/kelurahan telah sesuai dengan standar, norma, dan ketentuan yang berlaku	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Nop			√		Nop				√	1 LHA
45	Kecamatan Tutar	ATT/untuk menilai pengelolaan keuangan kecamatan/kelurahan telah sesuai dengan standar, norma, dan ketentuan yang berlaku	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Nop			√		Nop				√	1 LHA
46	Dinas Pendidikan	Audit Tujuan tertentu atas Perjalanan Dinas/Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data jumlah guru yang	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Nop	√				Nop		√			1 LHA
47	OPD 1	Audit Tujuan tertentu atas Perjalanan Dinas/ Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja perjalanan dinas telah seususai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,360,000	Nop	√				Nop		√			1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
II	IRBAN KESRA																		
48	OPD 2	Audit Tujuan tertentu atas Perjalanan Dinas/ Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja perjalanan dinas telah sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,360,000	Nop	√				Nop		v			1 LHA
49	OPD 3	Audit Tujuan tertentu atas belanja Perjalanan Dinas/ Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja perjalanan dinas telah sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,360,000	Nop	√				Nop		v			1 LHA
50	OPD 4	Audit Tujuan tertentu atas belanja honorarium/ Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja honorarium telah sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,360,000	Nop	√				Nop		v			1 LHA
51	OPD 5	Audit Tujuan tertentu atas belanja honorarium/ Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja honorarium telah sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,360,000	Nop	√				Nop		v			1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
II	IRBAN KESRA																		
52	OPD 6	Audit tujuan tertentu atas belanja Hibah dan bantuan sosial Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja hibah dan sosial sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,360,000	Nop	√				Nop		√			1 LHA
53	OPD 7	Audit tujuan tertentu atas belanja Hibah dan bantuan sosial Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja hibah dan sosial sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,360,000	Nop	√				Nop		√			1 LHA
54	OPD 8	Audit tujuan tertentu atas belanja Hibah dan bantuan sosial Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja hibah dan sosial sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,360,000	Nop	√				Nop		√			1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
II	IRBAN KESRA																		
55	OPD 9	Audit Ketaatan atas belanja Hibah dan bantuan sosial Untuk meyakini bahwa pengelolaan belanja hibah dan sosial sesuai dengan prosedur, aturan, standar dan ketentuan yang berlaku	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 4 orang	10 HP	Rp 11,360,000	Nop	√				Nop		√			1 LHA
56	Pemda	Reviu RKPD/kesesuaian informasi dalam RKPD dengan informasi dalam RPJMD dan kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	April			√		April				√	1 LHA
57	Pemda	Reviu RKPD/kesesuaian informasi dalam RKPD P dengan informasi dalam RPJMD P dan kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Juni			√		Juni				√	1 LHA
58	OPD	Reviu Renja OPD/kesesuaian informasi dalam Renja dengan informasi dalam RKPD dan kesesuaian perumusan dokumen perencanaan	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Sept	√				Sept		√			1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
II	IRBAN KESRA																		
59	OPD	Reviu Renja OPD/kesesuaian informasi dalam Renja dengan ingormasi dalam RKPD dan kesesuaian perumusan dokumen perencanaan	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Sept	√				Sept		√			1 LHA
60	OPD	Reviu Renja OPD/kesesuaian informasi dalam Renja dengan ingormasi dalam RKPD dan kesesuaian perumusan dokumen perencanaan	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Sept	√				Sept		√			1 LHA
61	OPD	Reviu Renja OPD/kesesuaian informasi dalam Renja dengan ingormasi dalam RKPD dan kesesuaian perumusan dokumen perencanaan	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Sept	√				Sept		√			1 LHA
62	OPD	Reviu Renja OPD/kesesuaian informasi dalam Renja dengan ingormasi dalam RKPD dan kesesuaian perumusan dokumen perencanaan	2026	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Sept	√				Sept		√			1 LHA
63	Kelurahan di Kec Polewali	ATT/untuk menilai Pengelolaan keuanagan dan Aset telah sesuai standar, norma, dan ketentuan	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Nop			√		Nop				√	1 LHA
68	Desa di Kecamatan Tapango	ATT Dana Desa /untuk menilai kepatuhan pengelolaan keuangan Dana Desa telah sesuai norma, standar dan ketentuan	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Okt			√		Okt				√	1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
II	IRBAN KESRA																		
69	Desa di Kec. Luyo	ATT Dana Desa /untuk menilai kepatuhan pengelolaan keuangan Dana Desa telah sesuai norma, standar dan ketentuan	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Okt			√		Okt				√	1 LHA
70	Desa di Kec. Tinambung	ATT Dana Desa /untuk menilai kepatuhan pengelolaan keuangan Dana Desa telah sesuai norma, standar dan ketentuan	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Okt			√		Okt				√	1 LHA
71	Desa di Kec. Tutar	ATT Dana Desa /untuk menilai kepatuhan pengelolaan keuangan Dana Desa telah sesuai norma, standar dan ketentuan	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Okt			√		Okt				√	1 LHA
72	Desa di Kecamatan Tapango	ATT Kepatuhan Pajak /untuk menilai kepatuhan pengelolaan keuangan Dana Desa telah sesuai norma, standar dan ketentuan	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Feb	√				Feb		√			1 LHA
73	Desa di Kec. Luyo	ATT Kepatuhan Pajak /untuk menilai kepatuhan pengelolaan keuangan Dana Desa telah sesuai norma, standar dan ketentuan	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Feb	√				Feb		√			1 LHA
74	Desa di Kec. Tinambung	ATT Kepatuhan Pajak /untuk menilai kepatuhan pengelolaan keuangan Dana Desa telah sesuai norma, standar dan ketentuan	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Feb	√				Feb		√			1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan					Bulan					
II	IRBAN KESRA									I	II	III	IV		I	II	III	IV	
75	Desa di Kec. Tutar	ATT Kepatuhan Pajak /untuk menilai kepatuhan pengelolaan keuangan Dana Desa telah sesuai norma, standar dan ketentuan	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,200,000	Feb	√				Feb		√			1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan					Bulan					
										I	II	III	IV		I	II	III	IV	
III	IRBAN WILAYAH III																		
A	Audit Ketaatan Pajak Desa							Rp 69,760,000											
1	Tim 1	Audit Ketaatan Pajak Desa pada Desa	2022		PJ WPJ PT KT AT1 AT2 AT3 AT4	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	11,200,000	Januari			√		Januari				√	1 LHA
2	Tim 2	Audit Ketaatan Pajak Desa pada Desa	2022		PJ WPJ PT KT AT1	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	10 HP	11,200,000	Januari			√		Januari				√	1 LHA
3	Tim 3	Audit Ketaatan Pajak Desa pada Desa	2022		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 5 Orang	10 HP	12,800,000	Januari			√		Januari				√	1 LHA
4	Tim 4	Audit Ketaatan Pajak Desa pada Desa	2023		PJ WPJ PT KT AT1 AT2 AT3	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	11,520,000	Feb			√		Feb				√	1 LHA
4	Tim 5	Audit Ketaatan Pajak Desa pada Desa	2023		PJ WPJ PT KT AT1 AT2 AT3	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	11,520,000	Feb			√		Feb				√	1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan					Bulan					
III	IRBAN WILAYAH III	Audit Ketaatan Pajak Desa pada Desa	2023		PJ	1 Orang	10 HP		Feb	I	II	III	IV	Feb	I	II	III	IV	1 LHA
4	Tim 6				WPJ PT KT AT1 AT2 AT3	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang		11,520,000											
B	Audit Kinerja Berbasis Aplikasi Siswaskeudes							Rp 11,520,000											
1	Tim 1	Audit Kinerja berbasis aplikasi siswaskeudes 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2024		PJ WPJ PT KT AT1 AT2 AT3	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	12 HP	Rp 11,520,000	April			√		Mei		√			
C	Audit Pemeriksaan Dana Bumdes							Rp 20,800,000											
1	Tim 1	Melakukan Audit Keuangan dan Aset Pengelola Dana BUMDES Tahun Anggaran 2022 - 2024 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Dana Bumdes Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2022 - 2024		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	10 HP	10,400,000	Maret	√				Maret		√			
2	Tim 2	Melakukan Audit Keuangan dan Aset Pengelola Dana BUMDES Tahun Anggaran 2022 - 2024 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan Dana Bumdes Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2022 - 2024		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	10 HP	10,400,000	Maret	√				Maret		√			

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan					Bulan					
										I	II	III	IV		I	II	III	IV	
III	IRBAN WILAYAH III																		
D	Audit Keuangan dan Aset pada kantor Kecamatan dan Kelurahan							Rp 29,280,000											
1	Tim 1	Audit Keuangan dan Aset pada Kecamatan dan Kelurahan 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	10 HP	Rp 13,440,000	Agustus			√		Sep				√	1 LHA
2	Tim 2	Audit Keuangan dan Aset pada Kecamatan dan Kelurahan 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	10 HP	Rp 15,840,000	Agustus			√		Sep				√	1 LHA
E	Reviu Penjaminan Kualitas atas hasil Penilaian Mandiri SPIP pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Tahun 2025							Rp 43,200,000											
1	Tim 1	Evaluasi 1) Untuk memberikan keyakinan memadai Evaluasi Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 6 Orang	10 HP	Rp 21,600,000	Agustus				√	September				√	1 LHE
2	Tim 2	Evaluasi 1) Untuk memberikan keyakinan memadai Evaluasi Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 6 Orang	10 HP	Rp 21,600,000	Agustus				√	September				√	1 LHE
F	Asistensi Penerapan Manajemen Risiko & IEPK							Rp 29,280,000											
1	Tim 1	Asistensi 1) Asistensi penerapan manajemen risiko indeks & Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi	2025		PJ WPJ PT KT AT1 AT1 AT 1	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	Rp 13,440,000	Juni		√			Juli		√			1 Laporan Asistensi

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RPL				Jumlah LHA	
									Bulan					Bulan					
										I	II	III	IV		I	II	III		IV
III	IRBAN WILAYAH III		2025		PJ WPJ PT KT AT1 AT1 AT 1	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	Rp 15,840,000	Juni	I	II √	III	IV	Juli	I	II √	III	IV	1 Laporan Asistensi
2	Tim 2	Asistensi 1) Asistensi penerapan manajemen risiko indeks & Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi																	
G	Reviu Manajemen ASN																		
	Tim 1		2025		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	10 HP	Rp 12,800,000	April		√			Mei		√			
H	Evaluasi Lakip							Rp 20,800,000											
1	Tim 1	Evaluasi 1) Untuk memberikan keyakinan memadai Evaluasi Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 9 Orang	10 HP	Rp 20,800,000	Agustus		√			Septemb er	√				1 LHE
I	Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2024							Rp 16,000,000											
	Tim 1	Reviu 1) Untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kenerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 16,000,000	Feb	√				Feb		√			1 LHR
J	Reviu atas penilaian Reformasi Birokrasi							Rp 53,080,000											
1	Tim 1	Reviu Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan OPD 1) Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh PEMDA	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 13,270,000	April	√				April		√			

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan					Bulan					
										I	II	III	IV		I	II	III	IV	
III 2	IRBAN WILAYAH III																		
	Tim 2	Reviu Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan OPD 1) Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh PEMDA	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 13,270,000	Juli	√				Juli		√			
	3	Tim 3	Reviu Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan OPD 1) Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh PEMDA	2025	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 13,270,000	Okt	√				Okt		√			
	4	Tim 4	Reviu Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan OPD 1) Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh PEMDA	2025	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 13,270,000	Januari	√				Januari				√	
K	Audit Keuangan ADD dan DD Tahun 2024							Rp 206,600,000											
1	Tim 1	Audit Keuangan Desa pada Desa 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2024		PJ WPJ PT KT AT1 AT1 AT2	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	Rp 13,440,000	Juni		√			Juli			√		1 LHA
	Tim 2	Audit Keuangan Desa pada Desa 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2024		PJ WPJ PT KT AT1 AT1 AT1	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	Rp 15,840,000	Juni		√			Juli			√		1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan					Bulan					
III	IRBAN WILAYAH III																		
	Tim 3	Audit Keuangan Desa pada Desa 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2024		PJ WPJ PT KT AT1 AT1 AT1	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	Rp 13,600,000	Juni	I	II	III	IV	Juli	I	II	III	IV	1 LHA
	Tim 4	Audit Keuangan Desa pada Desa 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2024		PJ WPJ PT KT AT1 AT1 AT1	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	Rp 15,840,000	Juni		√			Juli			√		1 LHA
	Tim 5	Audit Keuangan Desa pada Desa 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2024		PJ WPJ PT KT AT1 AT1 AT1	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	Rp 13,600,000	Juni		√			Juli			√		1 LHA
	Tim 6	Audit Keuangan Desa pada Desa 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2024		PJ WPJ PT KT AT1 AT1 AT1	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	Rp 15,840,000	Juni		√			Juli			√		1 LHA
	Tim 7	Audit Keuangan Desa pada Desa 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2024		PJ WPJ PT KT AT1 AT1 AT1	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	Rp 15,840,000	Juni		√			Juli			√		1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan					Bulan					
III	IRBAN WILAYAH III																		
	Tim 8	Audit Keuangan Desa pada Desa 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2024		PJ WPJ PT KT AT1 AT1 AT1	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	Rp 11,400,000	Sep		√			Okt			√		1 LHA
	Tim 9	Audit Keuangan Desa pada Desa 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2024		PJ WPJ PT KT AT1 AT1 AT1	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	Rp 11,400,000	Sep		√			Okt			√		1 LHA
	Tim 10	Audit Keuangan Desa pada Desa 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2024		PJ WPJ PT KT AT1 AT1 AT1	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	Rp 11,400,000	Sep		√			Okt			√		1 LHA
	Tim 11	Audit Keuangan Desa pada Desa 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2024		PJ WPJ PT KT AT1 AT1 AT1	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	Rp 11,400,000	Sep		√			Okt			√		1 LHA
	Tim 12	Audit Keuangan Desa pada Desa 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2024		PJ WPJ PT KT AT1 AT1 AT1	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	Rp 11,400,000	Sep		√			Okt			√		1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan					Bulan					
III	IRBAN WILAYAH III																		1 LHA
	Tim 13	Audit Keuangan Desa pada Desa 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2024		PJ WPJ PT KT AT1 AT1 AT1	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	Rp 11,400,000	Sep		√			Okt			√		
	Tim 14	Audit Keuangan Desa pada Desa 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2024		PJ WPJ PT KT AT1 AT1 AT1	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	Rp 11,400,000	Sep		√			Okt			√		
	Tim 15	Audit Keuangan Desa pada Desa 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2024		PJ WPJ PT KT AT1 AT1 AT1	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	Rp 11,400,000	Sep		√			Okt			√		
	Tim 16	Audit Keuangan Desa pada Desa 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2024		PJ WPJ PT KT AT1 AT1 AT1	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	Rp 11,400,000	Sep		√			Okt			√		
L	Monev Desa							Rp 56,000,000											
1	Tim 1	Monev Desa 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT1 AT1 AT2	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	Rp 11,200,000	Juli	√				Juli			√		1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan					Bulan					
III	IRBAN WILAYAH III	Monev Desa 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT1 AT1 AT1	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	Rp 11,200,000	Nov	√				Nov			√		1 LHA
	Tim 3	Monev Desa 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2025		PJ WPJ PT KT AT1 AT1 AT1	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	Rp 11,200,000	Nov	√				Nov			√		1 LHA
	Tim 4	Monev Desa 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2024		PJ WPJ PT KT AT1 AT1 AT1	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	Rp 11,200,000	Nov	√				Nov			√		1 LHA
	Tim 5	Monev Desa 1) Untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Keuangan dan Aset Sudah sesuai dengan Aturan Perundangan	2024		PJ WPJ PT KT AT1 AT1 AT1	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang	10 HP	Rp 11,200,000	Nov	√				Nov			√		1 LHA
M	Asistensi Penilaian Mandiri SPIP-T (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)							Rp 31,680,000											
	Tim 1	Asistensi 1) Asistensi penilaian mandiri SPIP-T Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi)	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 15,840,000	Juli				√	Agustus		√			1 LHA

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan	I	II	III	IV	Bulan	I	II	III	IV	
III	IRBAN WILAYAH III Tim 2	Asistensi 1) Asistensi penilaian mandiri SPIP-T Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi)	2025		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 5 orang	10 HP	Rp 15,840,000	Juli				√	Agustus		√			1 LHA
N	Asistensi Register Risiko							Rp 28,800,000											
1	Tim 1	Asistensi Register Risiko 1) Untuk memberikan keyakinan sejauh mana perangkat daerah telah mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko.	2025		PJ WPJ PT KT AT1	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 5 Orang	10 HP	Rp 14,400,000	Maret	√				Maret				√	1 LHE
	Tim 2	Asistensi Register Risiko 1) Untuk memberikan keyakinan sejauh mana perangkat daerah telah mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko.	2025		PJ WPJ PT KT AT1	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 5 Orang	10 HP	Rp 14,400,000	Maret	√				Maret				√	1 LHE
O	Evaluasi Sakip							Rp 12,800,000											
	Tim 1		2025		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 4 Orang	10 HP	Rp 12,800,000	Juli		√			Juli		√			
P	Pendampingan SPM							Rp 11,200,000											
1	Tim 1		2025		PJ WPJ PT KT AT	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	10 HP	Rp 11,200,000	April		√			Mei	√				1 LHP

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya		RMP					RPL					Jumlah LHA
										Bulan					Bulan					
IV	IRBAN KHUSUS/INVESTIGASI									I	II	III	IV		I	II	III	IV		
1	Permintaan dari Aparat Penegak Hukum	Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)	2024	Tinggi	PJ PT KT AT	3 orang 3 orang 3 orang 6 orang	10 HP	Rp 31,050,000	Jan	√				Des				√	3 LHAPKKN	
2	Permintaan Audit Dari OPD	Audit Tujuan Tertentu 1) Untuk menilai kepatuhan terhadap perundang-undangan, pedoman dan kebijakan yang berlaku; 2) Memberikan rekomendasi perbaikan	2024 dan 2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 30 orang	10 HP	Rp 119,500,000	Jan	√				Des				√	10 LHA	
3	Permintaan dari Aparat Penegak Hukum dan Laporan Pengaduan	Pemeriksaan Investigasi 1) Untuk menilai kepatuhan terhadap perundang-undangan, pedoman dan kebijakan yang berlaku; 2) Mengidentifikasi potensi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan; 3) Memberikan rekomendasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	8 orang 8 orang 8 orang 8 orang 24 orang	12 HP	Rp 114,720,000	Jan	√				Des				√	8 LHA	
4	Laporan Pengaduan Masyarakat dan Perintah Pimpinan	Pemeriksaan Khusus 1) Untuk menilai kepatuhan terhadap perundang-undangan, pedoman dan kebijakan yang berlaku; 2) Memberikan rekomendasi perbaikan; 3) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2024 dan 2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 20 orang	10 HP	Rp 103,500,000	Jan	√				Des				√	10 LHP	

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan					Bulan					
IV	IRBAN KHUSUS/INVESTIGASI									I	II	III	IV		I	II	III	IV	
5	Laporan Pengaduan Cerai dan Disiplin PNS	Pemeriksaan Khusus 1) Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan untuk mengambil keputusan selanjutnya	2024 dan 2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	23 orang 23 orang 23 orang 23 orang 23 orang	7 HP	Rp 140,875,000	Jan	√				Des				√	23 LHP
6	Laporan Pengaduan Masyarakat	Penelaahan Informasi Awal terhadap laporan pengaduan	2024 dan 2025	Tinggi	Penelaah 1 Penelaah 2 Penelaah 3	12 orang 12 orang 12 orang	5 HP	Rp 28,800,000	Jan	√				Des				√	12 Nota Dinas atau Laporan
7	Pemerintah Daerah Kab.Polewali Mandar	Audit Barang Milik Daerah 1) Untuk menilai kepatuhan pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap perundang-undangan, pedoman dan kebijakan yang berlaku; 2) Memberikan rekomendasi perbaikan	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,950,000	Juli		√			Juli				√	1 LHP
8	Pemerintah Daerah Kab.Polewali Mandar (UKPBJ)	Reviu HPS Tujuan: 1) Memberikan keyakinan memadai bahwa HPS telah dibuat sesuai dengan standar, norma dan aturan yang berlaku; 2) Mengidentifikasi potensi pemborosan atau alokasi anggaran yang tidak proporsional;	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,950,000	Mei	√				Mei				√	1 LHR

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya		RMP					RPL				Jumlah LHA
										Bulan					Bulan				
IV	IRBAN KHUSUS/INVESTIGASI									I	II	III	IV		I	II	III	IV	
9	Pemerintah Daerah Kab.Polewali Mandar	Reviu atas Rancangan KUA dan PPAS Tujuan: Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa KUA PPAS telah disusun berdasarkan RKPD dan didukung dengan dokumen yang memadai serta penyusunannya telah sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran.	2025	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,950,000	Juli	√				Juli				√	1 LHR
10	OPD Yang Menyelenggarakan Pelayanan Publik	Evaluasi Pelayanan Publik Tujuan: Menilai kualitas, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat	2024		PJ WPJ PT KT AT	1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 3 orang	10 HP	Rp 11,950,000	Agust		√			Des				√	1 LHE
11	Pemerintah Daerah Kab.Polewali Mandar	Evaluasi Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tujuan: 1) Menilai ketepatan penyaluran dana desa di tingkat pemerintah daerah dan pemerintah desa; 2) Menilai ketaatan terhadap peraturan terkait pengelolaan Dana Desa; 3) Menilai efektivitas penggunaan dana desa	2024	Tinggi	PJ WPJ PT KT AT	2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 6 orang	10 HP	Rp 23,900,000	Okt	√				Okt				√	1 LHP

[illegible]

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025

Nomor PKPT	OPD/Kegiatan	Jenis/Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Risiko	Susunan Tim		Anggaran Waktu (HP)	Anggaran Biaya	RMP					RPL					Jumlah LHA
									Bulan					Bulan					
V	TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN									I	II	III	IV		I	II	III	IV	
1	Temuan BPK	Inventarisasi Temuan dan Tindak Lanjut RekomendasiTemuan BPK	s.d 2025		KT SKT AT	1 orang 1 orang 10 orang	Honor per bulan selama 12 bulan	Rp 264,341,173	Jan					Des					1 Dok
2	Temuan BPKP	Inventarisasi Temuan dan Tindak Lanjut RekomendasiTemuan BPKP	s.d 2025		KT SKT AT	1 orang 1 orang 10 orang	Honor per bulan selama 12 bulan		Jan					Des					1 Dok
3	Temuan Inspektorat Jendral	Inventarisasi Temuan dan Tindak Lanjut RekomendasiTemuan Inspektorat Kabupaten	s.d 2025		KT SKT AT	1 orang 1 orang 10 orang	Honor per bulan selama 12 bulan		Jan					Des					1 Dok
4	Temuan Inspektorat Propinsi	Inventarisasi Temuan dan Tindak Lanjut RekomendasiTemuan Inspektorat Kabupaten	s.d 2025		KT SKT AT	1 orang 1 orang 10 orang	Honor per bulan selama 12 bulan		Jan					Des					1 Dok
5	Temuan Inspektorat Kabupaten	Inventarisasi Temuan dan Tindak Lanjut RekomendasiTemuan Inspektorat Kabupaten	s.d 2025		KT SKT AT	1 orang 1 orang 10 orang	Honor per bulan selama 12 bulan		Jan					Des					1 Dok

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007